



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1678, 2020

Cukai Hasil Tembakau. Rincian Dana Bagi Hasil.
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahun
Anggaran 2021.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 230/PMK.07/2020

TENTANG

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 menurut total per provinsi;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat pembaharuan data daerah penghasil cukai hasil tembakau sehingga rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perubahan rincian transfer ke daerah termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.475.618.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta rupiah).
- (2) Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 493);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 563);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 650);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

- Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 368);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 767);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1235);
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 359) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1228);
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1467);
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014

- tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1068);
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1770);
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1774);
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 534);
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103); dan
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 230/PMK.07/2020
 TENTANG
 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	Total Provinsi Aceh	12.979.708
1	Provinsi Aceh	3.893.913
2	Kab. Aceh Barat	176.996
3	Kab. Aceh Besar	291.154
4	Kab. Aceh Selatan	176.996
5	Kab. Aceh Singkil	176.996
6	Kab. Aceh Tengah	283.425
7	Kab. Aceh Tenggara	176.996
8	Kab. Aceh Timur	202.495
9	Kab. Aceh Utara	233.695
10	Kab. Bireuen	178.022
11	Kab. Pidie	352.794
12	Kab. Simeulue	176.996
13	Kota Banda Aceh	2.831.936
14	Kota Sabang	176.996
15	Kota Langsa	176.996
16	Kota Lhokseumawe	530.988
17	Kab. Gayo Lues	1.358.082
18	Kab. Aceh Barat Daya	176.996
19	Kab. Aceh Jaya	176.996
20	Kab. Nagan Raya	176.996
21	Kab. Aceh Tamiang	176.996
22	Kab. Bener Meriah	321.435
23	Kab. Pidie Jaya	377.817
24	Kota Subulussalam	176.996
II	Total Provinsi Sumatera Utara	12.794.951
1	Provinsi Sumatera Utara	3.838.485
2	Kab. Asahan	119.953
3	Kab. Dairi	285.143
4	Kab. Deli Serdang	134.149
5	Kab. Karo	662.233
6	Kab. Labuhanbatu	119.953
7	Kab. Langkat	119.953
8	Kab. Mandailing Natal	120.982
9	Kab. Nias	119.953

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
10	Kab. Simalungun	516.235
11	Kab. Tapanuli Selatan	119.953
12	Kab. Tapanuli Tengah	119.953
13	Kab. Tapanuli Utara	815.437
14	Kab. Toba Samosir	119.953
15	Kota Binjai	119.953
16	Kota Medan	143.553
17	Kota Pematang Siantar	3.094.890
18	Kota Sibolga	119.953
19	Kota Tanjung Balai	119.953
20	Kota Tebing Tinggi	119.953
21	Kota Padang Sidempuan	119.953
22	Kab. Pakpak Bharat	122.940
23	Kab. Nias Selatan	119.953
24	Kab. Humbang Hasundutan	274.285
25	Kab. Serdang Bedagai	119.953
26	Kab. Samosir	119.953
27	Kab. Batu Bara	119.953
28	Kab. Padang Lawas	147.653
29	Kab. Padang Lawas Utara	119.953
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	119.953
31	Kab. Labuhanbatu Utara	119.953
32	Kab. Nias Utara	119.953
33	Kab. Nias Barat	119.953
34	Kota Gunungsitoli	119.953
III	Total Provinsi Sumatera Barat	3.079.849
1	Provinsi Sumatera Barat	923.953
2	Kab. Limapuluh Kota	597.406
3	Kab. Agam	311.155
4	Kab. Kepulauan Mentawai	51.331
5	Kab. Padang Pariaman	51.331
6	Kab. Pasaman	78.297
7	Kab. Pesisir Selatan	51.331
8	Kab. Sijunjung	51.331
9	Kab. Solok	69.216
10	Kab. Tanah Datar	352.636
11	Kota Bukit Tinggi	51.331
12	Kota Padang Panjang	51.331
13	Kota Padang	51.331
14	Kota Payakumbuh	59.262
15	Kota Sawahlunto	71.952
16	Kota Solok	51.331
17	Kota Pariaman	51.331
18	Kab. Pasaman Barat	51.331
19	Kab. Dharmasraya	51.331
20	Kab. Solok Selatan	51.331

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
IV	Total Provinsi Riau	11.300
1	Provinsi Riau	3.392
2	Kab. Bengkalis	308
3	Kab. Indragiri Hilir	308
4	Kab. Indragiri Hulu	308
5	Kab. Kampar	308
6	Kab. Kuantan Singingi	308
7	Kab. Pelalawan	308
8	Kab. Rokan Hilir	308
9	Kab. Rokan Hulu	308
10	Kab. Siak	308
11	Kota Dumai	308
12	Kota Pekanbaru	4.520
13	Kab. Kepulauan Meranti	308
V	Total Provinsi Jambi	1.783.056
1	Provinsi Jambi	534.914
2	Kab. Batang Hari	53.492
3	Kab. Bungo	53.492
4	Kab. Kerinci	564.004
5	Kab. Merangin	103.480
6	Kab. Muaro Jambi	53.492
7	Kab. Sarolangun	53.492
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	53.492
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	53.492
10	Kab. Tebo	53.492
11	Kota Jambi	53.492
12	Kota Sungai Penuh	152.722
VI	Total Provinsi Sumatera Selatan	822.957
1	Provinsi Sumatera Selatan	246.894
2	Kab. Lahat	28.790
3	Kab. Musi Banyuasin	15.430
4	Kab. Musi Rawas	15.430
5	Kab. Muara Enim	15.430
6	Kab. Ogan Komering Ilir	15.430
7	Kab. Ogan Komering Ulu	15.430
8	Kota Palembang	15.430
9	Kota Prabumulih	15.430
10	Kota Pagar Alam	15.430
11	Kota Lubuk Linggau	15.430
12	Kab. Banyuasin	15.430
13	Kab. Ogan Ilir	15.430
14	Kab. OKU Timur	50.204
15	Kab. OKU Selatan	281.049
16	Kab. Empat Lawang	15.430
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	15.430
18	Kab. Musi Rawas Utara	15.430

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
VII	Total Provinsi Lampung	4.442.907
1	Provinsi Lampung	1.332.873
2	Kab. Lampung Barat	99.598
3	Kab. Lampung Selatan	112.864
4	Kab. Lampung Tengah	119.181
5	Kab. Lampung Utara	101.660
6	Kab. Lampung Timur	394.115
7	Kab. Tanggamus	201.564
8	Kab. Tulang Bawang	103.593
9	Kab. Way Kanan	114.690
10	Kota Bandar Lampung	1.113.096
11	Kota Metro	104.595
12	Kab. Pesawaran	171.368
13	Kab. Pringsewu	154.352
14	Kab. Mesuji	116.213
15	Kab. Tulang Bawang Barat	100.685
16	Kab. Pesisir Barat	102.460
VIII	Total Provinsi DKI Jakarta	723.798
1	Provinsi DKI Jakarta	723.798
IX	Total Provinsi Jawa Barat	401.659.159
1	Provinsi Jawa Barat	120.497.746
2	Kab. Bandung	16.032.113
3	Kab. Bekasi	4.695.881
4	Kab. Bogor	4.654.808
5	Kab. Ciamis	4.820.193
6	Kab. Cianjur	4.938.025
7	Kab. Cirebon	5.359.927
8	Kab. Garut	24.647.865
9	Kab. Indramayu	4.635.045
10	Kab. Karawang	96.946.954
11	Kab. Kuningan	5.895.451
12	Kab. Majalengka	12.363.880
13	Kab. Purwakarta	4.634.529
14	Kab. Subang	4.772.221
15	Kab. Sukabumi	4.634.529
16	Kab. Sumedang	24.575.211
17	Kab. Tasikmalaya	4.825.797
18	Kota Bandung	4.970.620
19	Kota Bekasi	4.634.529
20	Kota Bogor	4.649.360
21	Kota Cirebon	4.665.784
22	Kota Depok	4.642.031
23	Kota Sukabumi	4.635.482
24	Kota Tasikmalaya	4.649.731
25	Kota Cimahi	4.750.226
26	Kota Banjar	4.640.705

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
27	Kab. Bandung Barat	5.577.023
28	Kab. Pangandaran	4.913.493
X	Total Provinsi Jawa Tengah	743.460.332
1	Provinsi Jawa Tengah	223.038.100
2	Kab. Banjarnegara	6.981.121
3	Kab. Banyumas	6.707.603
4	Kab. Batang	7.350.175
5	Kab. Blora	10.001.162
6	Kab. Boyolali	19.799.760
7	Kab. Brebes	7.046.325
8	Kab. Cilacap	6.723.773
9	Kab. Demak	19.298.745
10	Kab. Grobogan	14.873.745
11	Kab. Jepara	7.509.595
12	Kab. Karanganyar	14.157.256
13	Kab. Kebumen	8.190.396
14	Kab. Kendal	12.901.630
15	Kab. Klaten	14.620.464
16	Kab. Kudus	155.532.486
17	Kab. Magelang	14.421.301
18	Kab. Pati	11.470.980
19	Kab. Pekalongan	6.611.446
20	Kab. Pemasang	7.254.105
21	Kab. Purbalingga	7.167.576
22	Kab. Purworejo	7.894.221
23	Kab. Rembang	25.269.511
24	Kab. Semarang	8.505.179
25	Kab. Sragen	6.702.569
26	Kab. Sukoharjo	6.975.049
27	Kab. Tegal	7.284.405
28	Kab. Temanggung	32.243.677
29	Kab. Wonogiri	11.460.396
30	Kab. Wonosobo	12.126.569
31	Kota Magelang	6.625.806
32	Kota Pekalongan	7.108.120
33	Kota Salatiga	7.113.878
34	Kota Semarang	8.727.067
35	Kota Surakarta	7.206.196
36	Kota Tegal	6.559.945
XI	Total Provinsi DI Yogyakarta	10.072.363
1	Provinsi DI Yogyakarta	3.021.708
2	Kab. Bantul	2.184.250
3	Kab. Gunung Kidul	1.188.865
4	Kab. Kulon Progo	1.189.202
5	Kab. Sleman	1.722.587
6	Kota Yogyakarta	765.751

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
XII	Total Provinsi Jawa Timur	1.937.895.941
1	Provinsi Jawa Timur	581.368.785
2	Kab. Bangkalan	15.712.670
3	Kab. Banyuwangi	19.990.341
4	Kab. Blitar	20.847.459
5	Kab. Bojonegoro	50.099.001
6	Kab. Bondowoso	41.402.082
7	Kab. Gresik	19.134.727
8	Kab. Jember	62.283.147
9	Kab. Jombang	37.401.427
10	Kab. Kediri	41.302.094
11	Kab. Lamongan	42.277.745
12	Kab. Lumajang	23.532.561
13	Kab. Madiun	20.939.247
14	Kab. Magetan	19.242.254
15	Kab. Malang	80.025.348
16	Kab. Mojokerto	20.844.885
17	Kab. Nganjuk	22.411.508
18	Kab. Ngawi	24.593.613
19	Kab. Pacitan	19.818.093
20	Kab. Pamekasan	64.549.639
21	Kab. Pasuruan	200.445.362
22	Kab. Ponorogo	22.128.278
23	Kab. Probolinggo	57.873.101
24	Kab. Sampang	26.968.543
25	Kab. Sidoarjo	18.922.476
26	Kab. Situbondo	38.328.898
27	Kab. Sumenep	40.995.966
28	Kab. Trenggalek	19.141.183
29	Kab. Tuban	25.210.724
30	Kab. Tulungagung	25.088.337
31	Kota Blitar	19.170.797
32	Kota Kediri	66.109.242
33	Kota Madiun	18.922.855
34	Kota Malang	30.367.991
35	Kota Mojokerto	20.102.211
36	Kota Pasuruan	17.858.948
37	Kota Probolinggo	18.921.930
38	Kota Surabaya	24.640.014
39	Kota Batu	18.922.459
XIII	Total Provinsi Kalimantan Barat	113.005
1	Provinsi Kalimantan Barat	33.899
2	Kab. Bengkayang	44.740
3	Kab. Landak	2.608
4	Kab. Kapuas Hulu	2.608
5	Kab. Ketapang	2.608

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
6	Kab. Mempawah	2.608
7	Kab. Sambas	2.608
8	Kab. Sanggau	2.608
9	Kab. Sintang	2.608
10	Kota Pontianak	3.070
11	Kota Singkawang	2.608
12	Kab. Sekadau	2.608
13	Kab. Melawi	2.608
14	Kab. Kayong Utara	2.608
15	Kab. Kubu Raya	2.608
XIV	Total Provinsi Kalimantan Tengah	26
1	Provinsi Kalimantan Tengah	6
2	Kab. Barito Selatan	1
3	Kab. Barito Utara	1
4	Kab. Kapuas	1
5	Kab. Kotawaringin Barat	7
6	Kab. Kotawaringin Timur	1
7	Kota Palangkaraya	1
8	Kab. Katingan	1
9	Kab. Seruyan	1
10	Kab. Sukamara	1
11	Kab. Lamandau	1
12	Kab. Gunung Mas	1
13	Kab. Pulang Pisau	1
14	Kab. Murung Raya	1
277	Kab. Barito Timur	1
XV	Total Provinsi Kalimantan Selatan	6.296
1	Provinsi Kalimantan Selatan	1.893
2	Kab. Banjar	276
3	Kab. Barito Kuala	157
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	157
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	157
6	Kab. Hulu Sungai Utara	157
7	Kab. Kotabaru	157
8	Kab. Tabalong	157
9	Kab. Tanah Laut	157
10	Kab. Tapin	157
11	Kota Banjarbaru	1.387
12	Kota Banjarmasin	1.170
13	Kab. Balangan	157
14	Kab. Tanah Bumbu	157
XVI	Total Provinsi Kalimantan Timur	10.470
1	Provinsi Kalimantan Timur	3.141
2	Kab. Berau	349
3	Kab. Kutai Kartanegara	349
4	Kab. Kutai Barat	349

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
5	Kab. Kutai Timur	349
6	Kab. Paser	349
7	Kota Balikpapan	539
8	Kota Bontang	349
9	Kota Samarinda	3.998
10	Kab. Penajam Paser Utara	349
11	Kab. Mahakam Ulu	349
XVII	Total Provinsi Sulawesi Tengah	478.974
1	Provinsi Sulawesi Tengah	143.696
2	Kab. Banggai	152.952
3	Kab. Banggai Kepulauan	11.974
4	Kab. Buol	11.974
5	Kab. Toli-Toli	11.974
6	Kab. Donggala	11.974
7	Kab. Morowali	11.974
8	Kab. Poso	11.974
9	Kota Palu	11.974
10	Kab. Parigi Moutong	50.612
11	Kab. Tojo Una-Una	11.974
12	Kab. Sigi	11.974
13	Kab. Banggai Laut	11.974
14	Kab. Morowali Utara	11.974
XVIII	Total Provinsi Sulawesi Selatan	12.931.680
1	Provinsi Sulawesi Selatan	3.879.505
2	Kab. Bantaeng	253.769
3	Kab. Barru	190.501
4	Kab. Bone	817.165
5	Kab. Bulukumba	235.737
6	Kab. Enrekang	215.176
7	Kab. Gowa	168.674
8	Kab. Jeneponto	183.542
9	Kab. Luwu	181.226
10	Kab. Luwu Utara	168.674
11	Kab. Maros	168.674
12	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	168.674
13	Kota Palopo	168.674
14	Kab. Luwu Timur	168.674
15	Kab. Pinrang	168.674
16	Kab. Sinjai	1.139.512
17	Kab. Kepulauan Selayar	168.674
18	Kab. Sidenreng Rappang	168.674
19	Kab. Soppeng	3.188.934
20	Kab. Takalar	168.674
21	Kab. Tana Toraja	168.674
22	Kab. Wajo	203.155
23	Kota Pare-pare	168.674

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
24	Kota Makassar	250.696
25	Kab. Toraja Utara	168.674
XIX	Total Provinsi Sulawesi Tenggara	7.572
1	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.271
2	Kab. Buton	142
3	Kab. Konawe	142
4	Kab. Kolaka	142
5	Kab. Muna	142
6	Kota Kendari	3.029
7	Kota Bau-bau	142
8	Kab. Konawe Selatan	142
9	Kab. Bombana	142
10	Kab. Wakatobi	142
11	Kab. Kolaka Utara	142
12	Kab. Konawe Utara	142
13	Kab. Buton Utara	142
14	Kab. Konawe Kepulauan	142
15	Kab. Kolaka Timur	142
16	Kab. Muna Barat	142
17	Kab. Buton Tengah	142
18	Kab. Buton Selatan	142
XX	Total Provinsi Bali	7.255.187
1	Provinsi Bali	2.176.556
2	Kab. Badung	727.878
3	Kab. Bangli	290.259
4	Kab. Buleleng	1.013.432
5	Kab. Gianyar	497.790
6	Kab. Jembrana	289.283
7	Kab. Karangasem	321.585
8	Kab. Klungkung	272.070
9	Kab. Tabanan	444.979
10	Kota Denpasar	1.221.355
XXI	Total Provinsi Nusa Tenggara Barat	318.716.620
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	95.614.984
2	Kab. Bima	11.282.161
3	Kab. Dompu	5.527.579
4	Kab. Lombok Barat	17.181.488
5	Kab. Lombok Tengah	51.568.196
6	Kab. Lombok Timur	59.881.093
7	Kab. Sumbawa	10.109.434
8	Kota Mataram	52.059.365
9	Kota Bima	2.309.484
10	Kab. Sumbawa Barat	3.202.255
11	Kab. Lombok Utara	9.980.581
XXII	Total Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.402.834
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.620.852

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
2	Kab. Alor	96.718
3	Kab. Belu	96.352
4	Kab. Ende	93.307
5	Kab. Flores Timur	260.129
6	Kab. Kupang	92.997
7	Kab. Lembata	85.245
8	Kab. Manggarai	261.307
9	Kab. Ngada	85.487
10	Kab. Sikka	1.432.267
11	Kab. Sumba Barat	79.261
12	Kab. Sumba Timur	101.059
13	Kab. Timor Tengah Selatan	91.199
14	Kab. Timor Tengah Utara	82.455
15	Kota Kupang	77.183
16	Kab. Rote Ndao	89.245
17	Kab. Manggarai Barat	111.509
18	Kab. Nagekeo	120.284
19	Kab. Sumba Barat Daya	172.346
20	Kab. Sumba Tengah	77.493
21	Kab. Manggarai Timur	98.827
22	Kab. Sabu Raijua	84.315
23	Kab. Malaka	92.997
XXIII	Total Provinsi Banten	802.853
1	Provinsi Banten	240.855
2	Kab. Lebak	34.408
3	Kab. Pandeglang	34.956
4	Kab. Serang	34.408
5	Kab. Tangerang	50.965
6	Kota Cilegon	34.408
7	Kota Tangerang	63.152
8	Kota Serang	34.706
9	Kota Tangerang Selatan	274.995
XXIV	Total Provinsi Gorontalo	697
1	Provinsi Gorontalo	208
2	Kab. Boalemo	42
3	Kab. Gorontalo	279
4	Kota Gorontalo	42
5	Kab. Pohuwato	42
6	Kab. Bone Bolango	42
7	Kab. Gorontalo Utara	42
XXV	Total Provinsi Kepulauan Riau	163.956
1	Provinsi Kepulauan Riau	49.186
2	Kab. Natuna	8.198
3	Kab. Kepulauan Anambas	8.198
4	Kab. Karimun	8.198
5	Kota Batam	65.582

(dalam ribuan rupiah)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
6	Kota Tanjung Pinang	8.198
7	Kab. Lingga	8.198
8	Kab. Bintan	8.198
XXVI	Total Provinsi Kalimantan Utara	1.509
1	Provinsi Kalimantan Utara	453
2	Kab. Bulungan	113
3	Kab. Malinau	113
4	Kab. Nunukan	113
5	Kota Tarakan	604
6	Kab. Tana Tidung	113
TOTAL		3.475.618.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI